

PENGUATAN DEMOKRASI DAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Perjalanan demokrasi dan sistem pemilihan selama perjalanan sejarah telah melibatkan perubahan yang signifikan sejak masa Yunani kuno hingga saat ini. Menurut Georgsorensen, istilah "demokrasi" memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang merujuk pada rakyat, dan "*kratos*" yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang diorganisir oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Awal mula demokrasi dapat ditelusuri kembali ke Athena sekitar tahun 600 SM, di mana sistem tersebut diimplementasikan sebagai bentuk langsung di mana warga kota secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, partisipasi dalam demokrasi tersebut dibatasi hanya pada kelompok tertentu, seperti laki-laki dewasa, dan mengalami pasang surut selama periode perang Peloponnesos. Di sisi lain, di Roma, meskipun tidak menerapkan demokrasi langsung, Republik Romawi melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembangan demokrasi mengalami titik balik pada Abad Pertengahan dengan munculnya sistem feodal otoriter. Namun, pada masa Renaissance, pemikiran demokrasi mulai mengemuka kembali, dan tokoh-tokoh pencerahan abad ke-18 seperti Montesquieu dan Rousseau berperan penting dalam memengaruhi Revolusi Amerika dan Prancis. Perubahan ini menciptakan landasan bagi dokumen konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Pada Abad ke-19, perkembangan demokrasi ditandai dengan perluasan hak pilih bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Seiring berjalannya waktu menuju Abad ke-20, model demokrasi perwakilan mulai mendominasi, di mana warga negara memilih wakil mereka untuk mengambil keputusan politik. Paska Perang Dunia II, perkembangan demokrasi global dipengaruhi oleh proses dekolonisasi, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyebaran nilai-nilai demokrasi. Keseluruhan perjalanan demokrasi dan sistem pemilihan menunjukkan adaptasi dan evolusi yang terus menerus sepanjang sejarah, mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang di berbagai periode.

Demokrasi dianggap sebagai upaya manusia untuk mengamankan dan melindungi hak-hak fundamental mereka, karena di dalamnya terdapat sistem politik yang menghormati hak asasi

manusia. Konsep demokrasi tidak hanya memperhatikan hak-hak sipil dan politik masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan sejauh mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terjamin dalam perkembangannya. John Locke, dalam rangka menjaga ketertiban demokrasi yang sempurna, menyatakan perlunya pembagian fungsi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu legislatif (yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang), eksekutif (yang bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan mengeksekusi keputusan), dan federatif (yang merupakan kekuasaan yang tidak termasuk dalam dua mandat sebelumnya). Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem politik yang menghargai hak asasi manusia, melibatkan usaha masyarakat dalam melindungi hak-hak dasarnya, termasuk hak sipil, politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Menuju pemilihan umum 2024, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasinya. Pemilu ini dianggap sebagai momen krusial untuk menilai sejauh mana perkembangan demokrasi telah mencapai kematangan. Kunci untuk memperkuat legitimasi pemerintahan terletak pada penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Peningkatan partisipasi pemilih, terutama dari kalangan pemuda dan perempuan, menjadi fokus penting. Pihak berwenang harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari registrasi pemilih hingga penghitungan suara, dilaksanakan dengan integritas dan akuntabilitas.

Melihat dari perkembangan tersebut, isu-isu krusial seperti ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial akan menjadi fokus utama perdebatan selama periode kampanye. Pemilihan umum 2024 dianggap sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi demokrasinya, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, dan memberikan respons yang efektif terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Dalam menghadapi masa depan, konsolidasi demokrasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemilu, melainkan juga oleh komitmen berkelanjutan dalam mengatasi tantangan dan memperkuat nilai-nilai demokratis dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Kesadaran dan partisipasi pemilih pemula memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan demokrasi menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Pemilih pemula, yang dijelaskan dalam UU No 10 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20, merujuk kepada warga Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2, pada hari pemilihan atau pemungutan suara, pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau

lebih, termasuk mereka yang sudah menikah atau pernah menikah dan memiliki hak pilih. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi pemilih muda dalam pemilu-pemilu sebelumnya, masih terdapat beberapa kesamaan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak suara dan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari. Edukasi politik yang kurang memadai, baik di lembaga pendidikan maupun secara umum, dapat menjadi hambatan dalam memotivasi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, isu-isu seperti kecenderungan apatis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, serta perasaan bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan atau kurangnya informasi mengenai calon dan program politik, juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan literasi politik, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye sosial yang merangsang kesadaran akan peran pemilih dalam menentukan arah pemerintahan. Peran teknologi dan media sosial menjadi faktor penting untuk mencapai pemilih pemula. Pemanfaatan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat, memberikan edukasi politik, dan memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu krusial. Keaktifan di ranah digital juga dapat merangsang partisipasi dan keterlibatan pemilih muda yang cenderung lebih akrab dengan media online. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan media massa menjadi kunci dalam mengatasi kesiapan pemilih pemula dengan membangun kesadaran, memberikan edukasi yang inklusif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik. Indonesia dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 mencerminkan keterlibatan yang aktif dan demokratis dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi pemuda yang memegang peran kunci dalam membentuk masa depan negara.

Sehingga kampanye pemahaman media pelatihan literasi digital dan diskusi terbuka tentang isu-isu politik menjadi sangat relevan. Membangun kreativitas dan kemampuan berpikir analisis pada pemilih pemula dapat memberikan pondasi yang kuat untuk menghadapi dinamika politik yang kompleks. Selanjutnya yang ketiga, pengawasan regulasi politik harus ditekankan dalam konteks melibatkan pemilih pemula, Mereka cenderung menjadi target empuk bagi upaya manipulasi atau intimidasi politik. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban pemilih serta prosedur yang harus diikuti dalam melaporkan pelanggaran. Penguatan lembaga-lembaga pengawas dan peningkatan kehadiran mereka di dunia

digital juga akan memberikan rasa kepercayaan kepada pemilih pemula. dengan demikian, tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk memberikan Penguatan Demokrasi dan Pemilu bagi pemilih pemula menjelang pemilu 2024 pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Penguatan literasi politik mengacu pada usaha sistematis untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini juga mencakup peningkatan kesadaran terkait hak dan kewajiban politik, pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menilai informasi politik. Tujuan dari penguatan literasi politik adalah memberdayakan masyarakat agar dapat mengambil peran yang lebih aktif dan efektif dalam kehidupan politik, termasuk dalam proses pemilihan umum, advokasi isu-isu publik, dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Usaha ini dapat melibatkan pendidikan formal dan informal, pelatihan kampanye informasi, serta pemanfaatan media massa untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan politik masyarakat.

Penguatan pengawasan partisipatif merujuk pada upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol proses politik serta pemilihan umum. Ini melibatkan partisipasi aktif warga dalam memantau jalannya pemilihan, mengungkapkan informasi politik, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prinsip demokrasi. Penguatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses politik, memastikan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem politik. Ditegaskan bahwa kualitas dan integritas yang kuat dalam pemilihan umum dapat tercapai melalui pelaksanaan pemilu secara terbuka, adil, dan jujur.

Upaya ini dapat diimplementasikan dengan mendukung jalannya pemilu melalui pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dalam memonitor proses tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan mengurangi risiko tindakan kecurangan sejak tahap awal pemilihan.